

Harga Mahal Sebuah Berita DADANG S. ANSHORI

Pers Indonesia terus didera petaka. Petaka berikutnya adalah hukuman bagi majalah *Tempo* untuk membayar ganti rugi materil sebesar US \$ 1 juta atas pencemaran nama baik Tommy Winata dalam sebuah pemberitaan *Tempo*, Kamis 6 Februari 2003 “Gubernur Ali Mazi Bantah Tommy Winata Buka Usaha Judi”. Di samping itu, *Tempo* harus meminta maaf yang dimuat di sejumlah media nasional dan internasional. Angka ini, kata Fery Mursidan Baldan (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), akan membankrutkan pers (PR/21/1/2004). Kalahnya *Tempo* di persidangan bagi sebagian pihak akan membuat preseden buruk bagi kebebasan pers. Walaupun harus disadari bahwa bukan berarti pers harus selalu menang di depan pengadilan.

Kasus *Tempo* ini sebenarnya memberikan pelajaran baru bagi dunia pers dan dunia hukum. Pertama, kebebasan pers memang harus terus ditafsir ulang oleh para insan pers. Kolidor-kolidor pers dalam bentuk kode etik jurnalistik harus tetap menjadi acuan agar pers “selamat” dari segala macam teror media. Pers memang tidak bisa berlindung di balik kebebasannya dengan memberitakan sesuatu yang tidak pasti. Apalagi membangun opini di atas sebuah berita. Sebagai sumber informasi, pers harus menyajikan berita secara pasti. Kedua, pengadilan kasus pers belum banyak dilakukan di Indonesia. Pengadilan harus banyak belajar bagaimana menghukum pers, tanpa harus membunuh kehidupan pers.

Saat ini kasus-kasus pers tidak selalu dapat dikategorisasi dalam wacana prodemokrasi (kebebasan) dengan antidemokrasi. Kritik terhadap pers, kenyataannya juga pernah muncul dari Mantan Presiden Abdurahman Wahid --selama ini dijuluki lokomotif demokrasi-- sering merasa “dipelintir” oleh pemberitaan media. Demikian juga presiden Megawati mengkritik ketidakadilan (*complang*) pers dalam memberitakan dirinya. Bahkan kasus-kasus media dengan media itu sendiri. Kita khawatir usia kemerdekaan pers bukan mustahil sangat pendek di saat reformasi masih menjadi sebuah ikhtiar.

Kritik terhadap pers juga datang dari Herawati Diah (1997) bahwa pers bukan dunia kepanduan dengan nyanyian di sini senang di sana senang. Jurnalisme yang “diayun ke sini dan ke sana masih tetap senang”. Itulah jurnalisme industrial yang berorientasi pada profit dan tidak peduli pada idealisme dan komitmen jurnalisme itu sendiri: pers bebas, masyarakat demokratis, dan penegakkan hak azasi manusia.

Pertarungan antara idealisme pers dengan pers sebagai institusi bisnis akan sangat ditentukan oleh siapa yang “menguasai” pers tersebut. Hal ini terbukti, ketika *Tempo* dibreidel oleh Orba (1997), banyak insan pers yang tiarap. Mereka memilih jalan lain (menerbitkan majalah lainnya) daripada memperjuangkan haknya yang dirampas kekuasaan Orde Baru. Melawan kedhaliman penguasa bagi sebagian pihak adalah perilaku tidak produktif.

“Musuh” Pers

Pers harus diakui memiliki “ayah bunda”--meminjam istilah Ariel Heryanto. Kalau saat Orde Baru adalah pemerintah dan pemilik modal. Pada zaman Orba kematian pers hanya disebabkan dua faktor itu: persaingan pasar atau “beda persepsi” dengan pemerintah. Kini, di samping pemilik modal, “Ayah Bunda” pers adalah masyarakat

(publik) pembaca. Ke sanalah pers menghamba. Bermusuhan dengan masyarakat berarti kematian bagi pers tersebut.

Sebagai institusi sosial, tugas normatif pers adalah melakukan kontrol sosial. Kritik sesungguhnya bagian dari kontrol sosial pers. Dalam KBBI (1989:466) disebutkan arti kritik sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk suatu hasil karya. Istilah sosial dalam KBBI (1989:855) disebutkan dalam dua pengertian, yaitu 1) berkenaan dengan masyarakat; 2) suka memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian, tidak heran apabila kritik sosial pers sering dianggap sebagai ancaman atau perlawanan pers terhadap berbagai pihak.

Menurut Susanto (1977) suatu kritik adalah penilaian ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi masyarakat pada suatu saat. Kritik sosial akan mengedepankan bukti-bukti objektif dan bobot ilmiah terhadap masalah yang terjadi. Saat ini kritik sosial semakin diperlukan mengingat bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan memerlukan data-data yang akurat terhadap sebuah masalah.

Dalam kritik hal yang dianggap penting adalah proses berpikir ilmiah yang harus dilakukan seorang kritikus. Demikian pula pendekatan (metode) ilmiah yang digunakan. Pada hakikatnya sebuah kritik sosial menggunakan metode berpikir ilmiah, yakni menemukan masalah, mencari data, membuat hipotesis, mengolah data untuk pembuktian masalah, analisis dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.

Pers yang secara tersurat berperan melakukan kritik sosial akan melakukannya terhadap setiap persoalan dan fenomena sosial yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, pers yang hanya mementingkan aspek bisnis akan kehilangan “daya sengar” kritiknya. Pers bisnis hanya akan menjadi wakil kepentingan para kapitalis. Oleh karena itu, hanya pers yang netral dan menjaga objektivitas yang akan mampu melakukan kritik secara baik dan objektif.

Pada zaman Orba “musuh” media adalah kekuasaan. Namun dengan terbukanya pintu kebebasan, maka “musuh” media adalah kebebasan itu sendiri. Media yang hanya mengandalkan kebebasan tidak akan hidup lama. Media kini hidup dalam kenyataan semakin kritisnya masyarakat dan tingginya kemampuan masyarakat dalam memahami fakta-fakta sosial. Radikalisasi massa, somasi, dan meja pengadilan adalah jelmaan dari kebebasan yang ditafsir salah oleh insan pers. Menaklukkan kebebasan pers akan berarti pers hidup tanpa ketakutan oleh berbagai teror media. Sebaliknya apabila kebebasan pers itu dibiarkan liar, maka “musuh” pers tengah ditaburkan oleh para insan pers sendiri.

“Gaya” Kritik Pers

Gaya kritik surat kabar Indonesia, menurut James L. Peacock mirip pewayangan, yaitu hanya bayangan yang menjadi kenyataan. Melontarkan kritik memerlukan bakat tersendiri, bagaimana mengangkat sesuatu kasus ke permukaan sehingga dia muncul menjadi isu masyarakat tanpa melukai hati yang dikritik. Seolah-olah yang dikritik bagian dari si pengkritik, ia tidak ditunjuk hidungnya, tetapi sang indera dibuat kembang kempis (Aly, 1986:8).

Menurut wartawan senior Rosihan Anwar, dalam melakukan kritik, banyak media yang melakukan “kritik keping” Ada saatnya tiarap dan ada saatnya menembak. Memang nasib pers pada zaman Orde Baru, tidak lebih dari bagaimana menyiasati diri agar selamat dalam berbagai jepitan. Di saat kran keterbukaan dibuka lebar-lebar, pers

berhamburan dengan agenda-agenda yang diarsipkannya. Namun, di saat keterbukaan ini menyempit, dia pun harus hati-hati dari sasaran kekuasaan.

Dalam media massa kritik yang paling aman rupanya disampaikan dalam bentuk humor. Dalam pojok dan karikatur, gaya humor sangat kentara. Humor terbagi menjadi tiga macam, yakni ironi, sinisme dan sarkasme (Naomi, 1996:245). Kritik di masa Orde Baru tidak keluar dari tiga gaya tersebut. Menurut Danandjaya, humor bisa menjadi semacam katup pelepas. Humor tidak lagi sekadar “memproduksi” tertawa, tetapi membawa pemikiran tertentu yang lebih serius. Dalam tataran filosofis, humor merupakan media protes sosial yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Di samping itu, kritik humor lebih dapat menjamin keamanan kritikus sendiri.

Kritik yang tajam dan langsung (*to the point*) karapkali muncul di berbagai media saat ini. Sejak reformasi bergulir pers leluasa memberikan pertimbangan terhadap berbagai persoalan bangsa. Pers juga telah berandil banyak dalam mendorong keberanian masyarakat untuk menyatakan sikap dirinya. Namun kenyataan menunjukkan lain, banyak pihak yang belum siap dengan berbagai bentuk kebebasan ini. Pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat serba kebingungan dengan derasnya berbagai informasi. Demikian juga bagi para penguasa yang merasa posisinya akan menjadi korban kebebasan. Bukan mustahil, kasus *Tempo* adalah cermin dari kesiapan masyarakat kita dalam menerima kebebasan.

Kritik sebagai Komunikasi

Oleh karena kritik menurut Dahlan (1977) sangat erat kaitannya dengan sistem komunikasi yang berlalu di suatu negara. Sistem timbal balik akan memungkinkan seseorang menerima kritik dari orang lain dengan lapang dada. Masyarakat yang berbudaya feodal relatif tertutup atas kritik. Bagi mereka kritik adalah ancaman. Masyarakat ini cenderung masih menempatkan struktur sosial sebagai ukuran. Sebaliknya, masyarakat modern adalah masyarakat yang terbuka. Setiap orang berkompentensi untuk maju dan kemajuan diraih bukan tanpa kritik. Negara bukan lagi komponen yang mendominasi setiap bentuk komunikasi. Saat ini hampir setiap kebijakan harus melewati proses kritik masyarakat. Kritik tidak selalu diartikan perlawanan, namun menguji sisi baik dan buruk setiap kebijakan.

Komunikasi politik penting bagi sosialisasi dan penyadaran (baca: pencerahan) masyarakat. Komunikasi menjadi ruang publik untuk mendeteksi setiap denyut aspirasi dan respon masyarakat. Komunikasi politik juga akan menciptakan masyarakat menjadi sejajar dengan lembaga kekuasaan. Di saat akses kekuasaan dan hukum masih sangat berat dirasakan masyarakat karena komunikasi politik yang macet.

Kita bersyukur kalau setiap kasus pers bisa diselesaikan di meja pengadilan, tanpa ada kekerasan massa dan sikap-sikap anti hukum. Dalam sisi apapun kasus *Tempo* adalah pelajaran berharga bagi bangsa ini, khususnya institusi pers. Betapa pun pers dikalahkan, namun masyarakat bisa didewasakan untuk tidak mengambil tindakan di luar hukum. Sebagai negara yang sedang menata diri, hukum harus menjadi tempat bermuaranya pemutusan kebenaran. Dari kasus *Tempo* inilah kita menyadari betapa mahalny sebuah pemberitaan ***

Penulis adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unpad.